

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada BAB ini, penulis akan merumuskan hasil penelitian yang sudah dirumuskan pada BAB sebelumnya atau BAB III. Hasil penelitian yang sudah dikumpulkan penulis berupa hasil wawancara dengan ketiga narasumber. Penulis akan membagi hasil wawancara dengan masing-masing narasumber menjadi 6 sub bab, yaitu awal karir suami, masa pencalonan, masa kampanye, masa awal jabatan, pertengahan masa jabatan, dan akhir masa jabatan. Dalam sub bab yang akan dirumuskan, penulis akan mengaitkan dengan landasan teroi yang sudah dirumuskan pada BAB I.

4.1 Analisis Dimensi Pengalaman Politik Istri Pejabat

4.1.1 *Equilibrium* (Kehidupan Sebelum Politik)

Tahap *equilibrium* merupakan kondisi awal ketika kehidupan tokoh dalam narasi berada dalam keadaan relatif stabil sebelum munculnya gangguan atau perubahan. Dalam teori Todorov, narasi selalu dimulai dari suatu kondisi keseimbangan yang kemudian berubah karena munculnya peristiwa tertentu (Todorov, 1977:111). Dalam penelitian ini, tahap *equilibrium* merujuk pada kehidupan Krisseptiana, Listyati Purnama Rusdiana, dan Inggit Soraya sebelum suami mereka memasuki jabatan publik atau sebelum posisi politik suami mengubah kehidupan sosial mereka. Pada tahap ini, ketiga informan telah memiliki identitas sosial yang relatif mapan. Mereka bukan individu yang sepenuhnya baru dalam kehidupan sosial masyarakat. Masing-masing memiliki pengalaman, nilai, dan latar belakang yang kemudian menjadi dasar dalam menghadapi dunia politik. Oleh karena itu, kehidupan sebelum politik penting untuk dibahas karena menjadi kerangka awal yang membentuk cara mereka memahami peran sebagai istri pejabat.

Tabel 4.1 Perbandingan Dimensi *Equilibrium*

Informan	Krisseptiana		Listyati Purnama Rusdiana		Inggit Soraya	
Kategori koding	Profesionalisme & Adaptasi	Etika & Batasan	Kesadaran Birokrasi & Regulasi	Habitus Kepemimpinan Keluarga	Mentalitas Wirausaha (<i>Entrepreneurial Mindset</i>)	Diskontinuitas Pengetahuan Politik
Bukti Tekstual (Data Transkrip)	"Pembelajaran itu tidak didapat dari sekolah... tapi dari pengalaman-pengalaman jadi jatuh bangun".	"Sebisa mungkin saya itu tidak mencampuri urusan masalah pekerjaan maupun urusan e di politik".	"...ndilalah saya kan ASN, wes diajari ojo macam-macam kan ngono kuwi lho..." "...ada pakta integritas yang saya harus tanda tangan..."	"...latar belakang keluarga saya... bapak juga pernah jadi bupati di Wonogiri dan Sukoharjo..."	"...murni pengusaha. Dan kebetulan juga saya juga... Wirausaha. Kebetulan saya di bidang <i>craft</i> (kerajinan)".	"...bapak itu sendiri enggak ada <i>basic</i> kayak politik...". "...karena belum tahu dunia politik... saya tuh agak ragu-ragu dan agak takut".

Analisis Makna (Encoding/Decoding)	Pesan di-encode sebagai proses <i>learning by doing</i> . Latar belakang bankir membantunya beradaptasi dengan protokol.	Terdapat kesadaran pengetahuan untuk memisahkan ranah domestik dan politik praktis demi menjaga harmoni.	Encoding: Pemahaman mendalam Bu Lies sebagai ASN senior (sejak 1993) membentuk cara pandangnya yang sangat patuh pada aturan formal birokrasi, sehingga ia sangat berhati-hati dalam bertindak.	Encoding: Pengetahuan tentang dunia politik dan jabatan publik bukan hal baru baginya. Hal ini membentuk mentalitas "tidak ambisius" karena sudah terbiasa dengan fasilitas kekuasaan sejak kecil.	Encoding: Pengetahuan Bu Inggit didominasi oleh pengalaman sebagai pelaku UMKM "Racik Kelir". Kerangka ini membuatnya menyandikan posisi barunya bukan sebagai politisi murni, melainkan sebagai "praktisi" pemberdayaan ekonomi.	Encoding: Ketiadaan latar belakang birokrasi/politik praktis dalam keluarga inti menciptakan kecemasan awal. Dunia politik di-encode sebagai ruang asing penuh tanggung jawab berat yang awalnya dihindari.
---	--	--	---	--	---	---

Sumber: Data primer diolah (2026)

Sebelum dikenal sebagai istri pejabat, Krisseptiana memiliki pengalaman sebagai perempuan profesional. Pengalaman kerja di dunia perbankan membentuk kebiasaan untuk berinteraksi dengan banyak orang, menjaga sikap, membangun komunikasi, serta menampilkan diri secara profesional. Latar belakang ini menjadi modal penting ketika kemudian ia masuk ke ruang publik sebagai istri pejabat. Ia tidak memulai peran publik dari ruang yang benar-benar kosong, melainkan membawa pengalaman profesional yang membantunya beradaptasi dengan tuntutan sosial dan komunikasi masyarakat.

Dalam tahap *equilibrium*, Krisseptiana dapat dipahami sebagai individu yang telah memiliki identitas diri sebelum suaminya menduduki jabatan publik. Identitas tersebut berkaitan dengan dunia kerja, keluarga, dan kehidupan sosial yang lebih personal. Namun, ketika suaminya memasuki dunia politik, identitas tersebut kemudian mengalami perluasan. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai pribadi atau profesional, tetapi mulai dikenali masyarakat sebagai istri kepala daerah.

Kondisi awal ini penting karena memperlihatkan bahwa pengalaman politik Krisseptiana tidak terbentuk secara tiba-tiba. Kemampuan berkomunikasi, kemampuan menyesuaikan diri, dan keberanian tampil di ruang publik merupakan bagian dari pengalaman sebelumnya yang kemudian digunakan dalam menjalankan peran sebagai istri pejabat. Dengan demikian, tahap *equilibrium* pada Krisseptiana menunjukkan adanya modal profesional yang menjadi dasar bagi proses adaptasi politik berikutnya.

Berbeda dengan Krisseptiana, Listyati Purnama Rusdiana memasuki pengalaman sebagai istri pejabat dengan latar belakang sebagai Aparatur Sipil Negara. Sebelum dikenal sebagai istri Wakil Wali Kota Semarang, ia telah memiliki identitas sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan. Identitas sebagai ASN membentuk cara pandangnya terhadap aturan, etika kelembagaan, netralitas, dan batasan perilaku dalam ruang publik.

Pada tahap *equilibrium*, kehidupan Listyati berada dalam keseimbangan yang ditandai oleh rutinitas birokrasi dan tanggung jawab sebagai pegawai pemerintah. Sebagai ASN, ia terbiasa menjalankan peran berdasarkan aturan formal dan struktur organisasi yang jelas. Hal ini membedakannya dari informan lain karena sejak awal Listyati telah berada dalam lingkungan pemerintahan, tetapi bukan dalam posisi sebagai figur politik.

Keseimbangan awal Listyati kemudian menjadi penting ketika suaminya memasuki jabatan publik. Identitas sebagai ASN membuatnya tidak dapat sepenuhnya bergerak bebas dalam ruang politik. Ia harus memahami batas antara dukungan terhadap suami dan kewajiban menjaga netralitas sebagai aparatur negara. Dengan demikian, tahap *equilibrium* pada Listyati menunjukkan adanya identitas birokratis yang sejak awal membentuk cara ia menafsirkan peran sebagai istri pejabat.

Inggit Soraya memiliki keseimbangan awal yang berbeda dari dua informan lainnya. Sebelum menjalankan peran sebagai istri pejabat, Inggit lebih dekat dengan dunia usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat. Latar belakang sebagai wirausahawan membentuk cara pandangya terhadap kemandirian, kerja keras, pengembangan usaha, dan pemberdayaan ekonomi. Identitas ini kemudian menjadi modal penting ketika ia masuk ke ruang publik sebagai istri Wali Kota Pekalongan.

Pada tahap *equilibrium*, Inggit memiliki kehidupan yang lebih berorientasi pada keluarga, usaha, dan aktivitas sosial-ekonomi. Ia tidak sejak awal berada dalam struktur politik formal. Oleh karena itu, ketika suaminya masuk ke dunia politik, perubahan yang dialami Inggit menjadi cukup besar. Ia harus beradaptasi dengan dunia pemerintahan, kegiatan publik, organisasi perempuan, serta ekspektasi masyarakat terhadap istri kepala daerah.

Keseimbangan awal Inggit memperlihatkan bahwa pengalaman politik istri pejabat tidak selalu berangkat dari latar belakang politik atau birokrasi. Pengalaman sebagai wirausahawan justru menjadi dasar bagi cara Inggit

memahami peran publiknya. Ia cenderung memaknai peran sebagai istri pejabat melalui kegiatan pemberdayaan, ekonomi kreatif, UMKM, dan penguatan masyarakat. Dengan demikian, tahap *equilibrium* pada Inggit menunjukkan adanya modal sosial-ekonomi yang kemudian menjadi dasar dalam menjalankan komunikasi politik di ruang publik lokal.

4.1.2 *Disruption* (Masuknya Politik ke Kehidupan Keluarga)

Tahap *disruption* dalam teori Todorov menunjukkan adanya gangguan terhadap keseimbangan awal. Gangguan tersebut terjadi ketika muncul peristiwa yang mengubah kehidupan tokoh dan memaksa tokoh untuk menghadapi situasi baru (Todorov, 1977:111). Dalam penelitian ini, *disruption* terjadi ketika suami para informan masuk ke dunia politik, mencalonkan diri, atau menduduki jabatan publik. Peristiwa tersebut mengubah posisi sosial para informan dari individu dengan identitas pribadi dan profesional menjadi istri pejabat yang ikut berada dalam perhatian publik.

Masuknya politik ke dalam kehidupan keluarga tidak hanya mengubah aktivitas suami sebagai pejabat, tetapi juga memengaruhi kehidupan istri. Istri pejabat ikut menghadapi perubahan ritme kehidupan, perubahan relasi sosial, perubahan tanggung jawab, dan perubahan ekspektasi masyarakat. Mereka mulai diundang dalam berbagai kegiatan, diminta hadir dalam acara sosial, dilibatkan dalam organisasi perempuan, dan menjadi bagian dari simbol keluarga pejabat. Dalam kondisi ini, batas antara kehidupan pribadi dan kehidupan publik menjadi semakin kabur.

Gangguan terhadap keseimbangan awal tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk konflik terbuka. Pada beberapa informan, gangguan muncul sebagai tuntutan baru yang harus dijalani secara perlahan. Pada informan lain, gangguan muncul sebagai rasa takut, ragu, tekanan, atau kekhawatiran terhadap kemampuan diri dalam menjalankan peran publik. Dengan demikian, *disruption*

dalam pengalaman politik istri pejabat tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga emosional dan identitas

Tabel 4.2 Perbandingan Dimensi *Dissruption*

Informan	Krisseptiana		Listyati Purnama Rusdiana		Inggit Soraya	
Kategori koding	Struktur Organisasi	Kolaborasi & Hierarki	Struktur Ganda (Dual Peran)	Disiplin Kelembagaan (Gatekeeping)	Otoritas Berbasis Dinasti/Keluarga	Sinergi Institusional & OPD
Bukti Tekstual (Data Transkrip)	"Setiap istri wakil walikota itukan punya tugas fungsional sebagai wakil ketua tim Penggerak PKK".	"Diskusi dengan Pengurus... yang mereka udah senior-senior... banyak menerima masukan".	"...saya harus berbagi waktu atau pekerjaan kantor... pekerjaan organisasi belum lagi sebagai pendamping bapak..."	"...Bawaslu juga ngamati terus, ngawal... saya tahu cuman kan memang saya enggak ngapa-ngapain..."	"...kakak beliau, kakak kandung beliau kan itu pernah menjabat sebagai Wali Kota...". "Kalau tidak ada yang meneruskan dari pihak keluarga, mungkin seperti itu".	"...semua jabatan saya itu nempel dengan OPD... PKK kan ada di DPMPPA... Dekranasda juga ada di Dinas Koperasi dan UKM...".
Analisis Makna (Encoding/ Decoding)	Peran dan otoritas diproduksi berdasarkan	Produksi program dilakukan melalui	Encoding: Produksi narasi politiknya berada di bawah tekanan struktur	Encoding: Institusi negara (Bawaslu & BKD) bertindak	Encoding: Produksi awal karier politik suami (Pak Afzan)	Encoding: Produksi pesan dan program kerja Bu Inggit

Informan	Krisseptiana		Listyati Purnama Rusdiana		Inggit Soraya	
	jabatan fungsional yang melekat pada posisi suami.	dialog dengan tokoh senior dan koordinasi lintas dinas (DP3A).	ganda: ia harus menjalankan tugas dinas sebagai ASN , mengelola banyak ormas , sekaligus menjalankan fungsi domestik/protokoler pendamping suami.	sebagai <i>gatekeeper</i> . Hubungan produksi pesan dipisahkan secara ekstrem: dukungan politik tidak boleh diproduksi di ruang publik birokrasi.	didorong oleh struktur relasi kekeluargaan (menggantikan posisi almarhum kakaknya), bukan oleh rekrutmen parpol dari bawah.	tidak berdiri sendiri melainkan bertumpu pada struktur birokrasi legal-formal (Organisasi Perangkat Daerah) demi mendukung visi-misi Wali Kota.

Sumber: Data primer diolah (2026)

Pada pengalaman Krisseptiana, gangguan terhadap keseimbangan awal terjadi ketika posisi suaminya dalam dunia politik membuat dirinya ikut dikenal masyarakat. Perubahan ini membuat Krisseptiana harus menyesuaikan diri dengan peran baru sebagai istri pejabat. Ia tidak lagi hanya menjalankan kehidupan sebagai pribadi dan profesional, tetapi juga harus hadir dalam berbagai kegiatan sosial, organisasi, dan acara publik.

Perubahan tersebut menuntut Krisseptiana untuk mampu menjaga sikap dan citra di hadapan masyarakat. Sebagai istri pejabat, ia harus tampil kuat, ramah, dan siap menghadapi berbagai situasi. Dalam ruang publik, kondisi pribadi tidak selalu dapat ditampilkan secara bebas karena masyarakat melihat dirinya sebagai representasi dari keluarga kepala daerah. Hal ini menunjukkan bahwa gangguan yang dialami Krisseptiana bukan hanya perubahan aktivitas, tetapi juga perubahan dalam cara ia harus menampilkan diri.

Masuknya politik ke dalam kehidupan Krisseptiana membuat pengalaman profesionalnya diuji dalam konteks yang lebih luas. Jika sebelumnya komunikasi dilakukan dalam ruang kerja profesional, setelah menjadi istri pejabat komunikasi dilakukan dalam ruang sosial-politik yang lebih kompleks. Ia harus berhadapan dengan masyarakat, organisasi, birokrasi, media, dan berbagai pihak yang memiliki ekspektasi terhadap dirinya. Dengan demikian, tahap *disruption* pada Krisseptiana menunjukkan perubahan dari identitas profesional menuju identitas publik.

Pada pengalaman Listyati, gangguan terhadap keseimbangan awal muncul karena ia harus menjalankan dua posisi yang memiliki tuntutan berbeda. Sebagai ASN, ia terikat pada aturan birokrasi, netralitas, dan etika kelembagaan. Namun, sebagai istri Wakil Wali Kota, ia juga berada dalam posisi sosial yang menuntut kehadiran, dukungan, dan keterlibatan dalam kegiatan publik.

Perubahan ini menimbulkan ketegangan karena Listyati tidak dapat menjalankan peran sebagai istri pejabat secara bebas seperti individu yang tidak

terikat oleh status ASN. Ia harus berhati-hati dalam menunjukkan dukungan kepada suami, menjaga batasan dalam aktivitas politik, dan memastikan bahwa kehadirannya tidak melanggar aturan birokrasi. Dengan demikian, *disruption* pada Listyati tidak hanya muncul karena masuknya politik ke dalam kehidupan keluarga, tetapi juga karena adanya benturan antara identitas birokratis dan identitas sebagai istri pejabat.

Gangguan ini memperlihatkan bahwa pengalaman politik istri pejabat tidak selalu sama. Bagi Listyati, tantangan utama bukan hanya belajar tampil di ruang publik, tetapi juga menjaga keseimbangan antara dukungan personal terhadap suami dan kewajiban institusional sebagai ASN. Posisi ini membuat pengalaman politik Listyati lebih banyak diwarnai kehati-hatian, pembatasan diri, dan bentuk dukungan yang tidak selalu ditampilkan secara terbuka.

Pada pengalaman Inggit Soraya, *disruption* terjadi ketika kehidupan yang sebelumnya lebih dekat dengan dunia usaha berubah menjadi kehidupan yang terhubung dengan pemerintahan dan aktivitas publik. Perubahan posisi suami sebagai kepala daerah membuat Inggit ikut menghadapi dunia baru yang menuntut pemahaman tentang birokrasi, organisasi, kegiatan sosial, dan komunikasi dengan masyarakat.

Perubahan ini tidak sederhana karena dunia usaha dan dunia pemerintahan memiliki karakter yang berbeda. Dunia usaha menuntut kemandirian, kecepatan mengambil keputusan, dan orientasi pada hasil. Sementara itu, dunia pemerintahan memiliki prosedur, protokol, struktur organisasi, serta relasi sosial-politik yang lebih kompleks. Inggit harus menyesuaikan diri dengan tuntutan tersebut ketika menjalankan peran sebagai istri pejabat.

Gangguan terhadap keseimbangan awal Inggit juga muncul dalam bentuk tekanan waktu dan perubahan prioritas. Ia harus membagi perhatian antara keluarga, usaha, dan kegiatan publik. Posisi sebagai istri pejabat membuatnya tidak selalu dapat bergerak berdasarkan kehendak pribadi karena

terdapat ekspektasi masyarakat dan tanggung jawab sosial yang melekat pada dirinya. Dengan demikian, tahap *disruption* pada Inggit menunjukkan perubahan dari identitas wirausahawan menuju identitas publik dalam struktur pemerintahan lokal.

4.1.3 *Recognition of Disruption* (Kesadaran terhadap Konflik dan Tuntutan Baru)

Tahap *recognition of disruption* merupakan tahap ketika tokoh mulai menyadari bahwa perubahan yang terjadi telah menciptakan ketidakseimbangan baru dalam hidupnya. Todorov menjelaskan bahwa setelah gangguan muncul, tokoh dalam narasi akan mengenali adanya perubahan yang harus dihadapi (Todorov, 1977:112). Dalam penelitian ini, tahap tersebut tampak ketika para informan mulai menyadari bahwa menjadi istri pejabat bukan hanya soal hadir mendampingi suami, tetapi juga menjalankan tanggung jawab sosial, menjaga citra publik, berinteraksi dengan masyarakat, dan menyesuaikan diri dengan struktur politik lokal.

Kesadaran terhadap gangguan ini menjadi bagian penting dalam pengalaman politik istri pejabat karena pada tahap inilah konflik mulai terlihat. Konflik tersebut tidak selalu berbentuk pertentangan terbuka, tetapi dapat muncul sebagai tekanan batin, rasa tidak siap, ketakutan melakukan kesalahan, keterbatasan waktu, atau kebingungan dalam menempatkan diri. Dengan demikian, pengalaman politik istri pejabat tidak dapat dipahami hanya dari kegiatan yang tampak di permukaan, tetapi juga dari kesadaran subjektif mereka terhadap tuntutan yang menyertai peran tersebut.

Pada tahap ini, ketiga informan mulai menyadari bahwa posisi sebagai istri pejabat membawa konsekuensi sosial. Mereka tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi juga nama suami, keluarga, organisasi, dan pemerintahan daerah. Hal ini membuat setiap tindakan, ucapan, dan kehadiran mereka di ruang publik memiliki makna sosial-politik. Kesadaran tersebut kemudian

mendorong mereka untuk berhati-hati dalam bersikap, belajar memahami situasi, dan menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat

Tabel 4.3 Perbandingan Dimensi *Recognition of Disruption*

Informan	Krisseptiana	Listyati Purnama Rusdiana	Inggit Soraya
Kategori koding	Kanal Komunikasi	Kanal Sosial-Kultural & Jaringan Ormas	Ruang Publik Komunal & Media Sosial
Bukti Tekstual (Data Transkrip)	"Berkampanye di ruang ibu-ibu, misalnya senam... ikut kegiatan PKK".	"...ormas-ormas ini adalah ormas netral... Pemuda Panca Marga... IPEMI..."	"...saya masuk ke pengajian-pengajian ibu-ibu, ke komunitas... ada kegiatan mungkin senam...". "Kita dimudahkan dari media sosial juga... bisa jadi untuk inspirasi..."
Analisis Makna (Encoding/Decoding)	Menggunakan infrastruktur sosial (Posyandu, PKK, sekolah) dan teknologi (Zoom/Video Call) untuk penyebaran pesan.	Encoding: Memanfaatkan modal sosial berupa jaringan organisasi yang majemuk (lintas partai) sebagai infrastruktur senyap. Pesan tidak disalurkan lewat parpol, melainkan lewat relasi interpersonal yang "murni".	Encoding: Memanfaatkan infrastruktur kultural akar rumput (pengajian, senam) untuk mentransmisikan pesan politik/sosialisasi. Di sisi lain, menggunakan media sosial sebagai infrastruktur teknis untuk belajar dari istri kepala daerah lain.

Sumber: Data primer diolah (2026)

Pada pengalaman Krisseptiana, kesadaran terhadap gangguan tampak dari pemahamannya bahwa istri pejabat harus mampu mengelola diri di hadapan publik. Ia menyadari bahwa ruang publik menuntut dirinya untuk selalu tampak siap, kuat, dan terkendali. Kondisi pribadi seperti lelah, sakit, sedih, atau menghadapi masalah keluarga tidak selalu dapat ditampilkan secara terbuka karena masyarakat melihat dirinya sebagai figur publik.

Kesadaran tersebut menunjukkan bahwa pengalaman politik Krisseptiana tidak hanya berkaitan dengan kegiatan organisasi atau pendampingan suami, tetapi juga dengan pengelolaan emosi dan citra. Ia harus mampu menampilkan diri sesuai dengan harapan publik terhadap sosok istri pejabat. Dalam konteks ini, tekanan yang dihadapi bukan hanya tekanan tugas, tetapi juga tekanan representasi. Krisseptiana harus menjaga agar dirinya tetap dilihat sebagai figur yang stabil, ramah, dan mampu menjalankan peran sosial.

Hal ini memperlihatkan bahwa posisi istri pejabat membawa beban simbolik. Krisseptiana tidak hanya hadir sebagai individu, tetapi juga sebagai representasi keluarga kepala daerah. Oleh karena itu, pengalaman politiknya melibatkan kemampuan untuk mengelola kesan, menjaga komunikasi, dan menyesuaikan diri dengan ekspektasi masyarakat. Kesadaran inilah yang menjadi dasar bagi proses adaptasi pada tahap berikutnya.

Pada pengalaman Listyati, kesadaran terhadap gangguan terutama muncul dalam bentuk pemahaman terhadap batasan institusional. Sebagai ASN, ia menyadari bahwa dirinya tidak dapat secara bebas menunjukkan dukungan politik kepada suami. Ia harus menjaga netralitas, mematuhi aturan, dan berhati-hati dalam menempatkan diri dalam kegiatan publik. Kesadaran ini membuat pengalaman politik Listyati berbeda dari informan lain.

Listyati menyadari bahwa perannya sebagai istri pejabat tidak dapat dilepaskan dari statusnya sebagai aparatur negara. Ia berada dalam posisi yang menuntut kehati-hatian ganda. Di satu sisi, ia memiliki hubungan personal dan keluarga dengan suami yang menjabat. Di sisi lain, ia memiliki kewajiban

institusional sebagai ASN. Kondisi ini membuat dukungan yang diberikan Listyati lebih banyak dilakukan secara terbatas, tidak selalu terbuka, dan sering kali berada dalam ruang yang lebih personal.

Kesadaran terhadap batasan ini menunjukkan bahwa pengalaman politik istri pejabat juga dipengaruhi oleh struktur formal. Tidak semua istri pejabat memiliki ruang gerak yang sama. Status pekerjaan, aturan kelembagaan, dan posisi birokratis dapat membentuk cara seorang istri pejabat menjalankan peran publiknya. Dalam pengalaman Listyati, politik hadir sebagai ruang yang harus dinegosiasikan secara hati-hati agar tidak melanggar batas institusional.

Pada pengalaman Inggit, kesadaran terhadap gangguan muncul ketika ia menyadari bahwa dunia pemerintahan dan peran sebagai istri pejabat menuntut kemampuan baru yang sebelumnya tidak menjadi bagian utama dari kehidupannya. Sebagai wirausahawan, ia terbiasa dengan dunia usaha dan kegiatan ekonomi. Namun, ketika menjadi istri pejabat, ia harus berhadapan dengan kegiatan pemerintahan, organisasi perempuan, protokol, serta komunikasi publik yang lebih luas.

Kesadaran ini dapat menimbulkan rasa ragu, takut, atau tidak siap. Inggit harus belajar memahami peran baru dalam waktu yang relatif cepat. Ia tidak hanya dituntut hadir dalam kegiatan, tetapi juga memahami isu masyarakat, menjalankan organisasi, dan membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Dengan demikian, pengalaman politik Inggit memperlihatkan adanya proses belajar yang intensif.

Kesadaran terhadap tuntutan belajar cepat ini menjadi titik penting dalam narasi Inggit. Pada tahap ini, ia mulai memahami bahwa menjadi istri pejabat bukan hanya soal status, tetapi juga soal tanggung jawab. Ia harus menyesuaikan identitas sebagai pengusaha dengan peran baru sebagai figur publik. Proses ini memperlihatkan bahwa pengalaman politik istri pejabat dapat

menjadi ruang pembelajaran yang menuntut keberanian, fleksibilitas, dan kesiapan mental.

4.1.4 *Attempt to Repair* (Strategi Adaptasi dan Negosiasi Peran)

Tahap *attempt to repair* dalam teori Todorov merupakan tahap ketika tokoh berusaha mengatasi gangguan yang telah mengubah keseimbangan awal. Setelah tokoh menyadari adanya gangguan atau konflik, tokoh mulai melakukan tindakan untuk membangun kembali keseimbangan dalam kehidupannya (Todorov, 1977:112). Dalam penelitian ini, tahap *attempt to repair* terlihat melalui berbagai strategi adaptasi yang dilakukan oleh Krisseptiana, Listyati Purnama Rusdiana, dan Inggit Soraya dalam menjalankan peran sebagai istri pejabat.

Strategi adaptasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menjalankan kegiatan sosial, tetapi juga berkaitan dengan cara masing-masing informan menegosiasikan identitas pribadi dengan tuntutan publik. Ketiganya harus belajar memahami peran baru, membangun komunikasi dengan masyarakat, menyesuaikan diri dengan organisasi, menjaga citra, dan mengelola batas antara kehidupan pribadi dan kehidupan publik. Oleh karena itu, tahap ini menjadi bagian penting dalam pengalaman politik istri pejabat karena memperlihatkan bagaimana mereka tidak hanya menerima peran secara pasif, tetapi juga berusaha membentuk cara sendiri dalam menjalani peran tersebut.

Pada tahap ini, pengalaman politik istri pejabat tampak sebagai proses pembelajaran sosial dan politik. Para informan tidak selalu memiliki pengalaman politik formal sebelum suami mereka menduduki jabatan publik. Namun, mereka kemudian belajar melalui interaksi dengan masyarakat, kegiatan organisasi, arahan dari pihak lain, pengalaman lapangan, serta tuntutan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Proses belajar tersebut menunjukkan

bahwa pengalaman politik istri pejabat bersifat praktis, bertahap, dan sangat dipengaruhi oleh situasi sosial-politik yang mereka hadapi

Tabel 4.4 Perbandingan Dimensi *Encoding*

Informan	Krisseptiana		Listyati Purnama Rusdiana		Inggit Soraya	
Kategori koding	Citra Publik (Ideal)	Aspirasi Politik	Penyandian "Dukungan Senyap" (<i>Silent Support</i>)	Penyandian "Prinsip Normatif"	Penyandian "Amanah Religius- Kebermanfaatan"	Penyandian "Pembelajar Cepat"
Bukti Tekstual (Data Transkrip)	"Sakit enggak boleh tampak sakit, sedih enggak boleh tambah sedih, harus tampak selalu sehat dan bahagia".	"Kalau misalnya saya ini menjadi dewan saya kan punya aspirasi berarti aku bisa membantu masyarakat".	"...bu Iswar tidak bisa apa-apa karena bu Iswar status ASN... mendukung itu silent ya dibelakang layar."	"...kalau ada kegiatan-kegiatan saya tanpa undangan saya enggak mau ngintilin suami saya..."	"...qadarullah... saya diberikan amanah... Berarti saya harus bisa memberikan manfaat untuk banyak orang...".	"...ilmu ibaratnya enggak ada di kita belajar di sekolah... lebih ke pengalaman dan jam terbang...".
Analisis Makna (Encoding/Decoding)	Bu Tia menyandi dirinya sebagai figur publik yang harus	Pesan politik di-encode sebagai bentuk pengabdian dan perpanjangan	Encoding: Mengonstruksi narasi "istri yang taat asas". Dukungan	Encoding: Menyandi perannya bukan sebagai "aksesori politik" suami. Ia	Encoding: Guna mengatasi gejolak batin karena keluar dari zona nyaman bisnis , Bu Inggit	Encoding: Menyandi citra dirinya sebagai figur yang tangguh dan mau

Informan	Krisseptiana		Listyati Purnama Rusdiana		Inggit Soraya	
	menunjukkan stabilitas emosional di depan masyarakat.	tangan dari aspirasi warga.	politik sengaja disandikan dalam bentuk non-verbal, doa, rida, dan penyediaan data melalui anaknya, bukan melalui mobilisasi massa langsung.	menetapkan batasan ruang (<i>space boundaries</i>) yang tegas berdasarkan fungsi regulasi formal.	menyandikan ulang jabatan publiknya melalui konsep <i>Qadarullah</i> (takdir Allah) dan kewajiban moral untuk memberi kemanfaatan sosial.	berkembang. Ia memvalidasi kapasitas dirinya melalui pengakuan institusional (menjadi narasumber APEKSI dan penghargaan nasional).

Sumber: Data primer diolah (2026)

Pada pengalaman Krisseptiana, strategi adaptasi dilakukan dengan membawa nilai-nilai profesionalisme ke dalam ruang publik. Latar belakangnya sebagai perempuan profesional membantu dirinya untuk lebih mudah menyesuaikan diri dengan tuntutan sebagai istri pejabat. Pengalaman bekerja di dunia perbankan membentuk kemampuan berkomunikasi, menjaga penampilan, menghadapi orang lain, serta menyesuaikan diri dengan berbagai karakter masyarakat. Modal tersebut kemudian digunakan ketika ia harus menjalankan peran sosial dan politik sebagai istri kepala daerah.

Adaptasi Krisseptiana juga terlihat dari kemampuannya menjaga citra dan ketahanan diri di ruang publik. Ia menyadari bahwa sebagai istri pejabat, dirinya tidak dapat sepenuhnya menampilkan kondisi pribadi di hadapan masyarakat. Ketika berada di ruang publik, ia harus tetap menunjukkan sikap ramah, kuat, dan siap menjalankan tugas. Hal ini menunjukkan bahwa adaptasi yang dilakukan Krisseptiana bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga emosional. Ia harus mengelola perasaan pribadi agar tetap dapat memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap figur istri pejabat.

Strategi lain yang dilakukan Krisseptiana adalah membangun kedekatan sosial melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan. Keterlibatannya dalam organisasi perempuan, kegiatan kesehatan, kegiatan sosial, dan pemberdayaan masyarakat menjadi cara untuk menyesuaikan diri dengan peran publik. Melalui kegiatan tersebut, Krisseptiana tidak hanya hadir sebagai pendamping suami, tetapi juga membangun hubungan langsung dengan warga. Kedekatan sosial ini menjadi bagian dari komunikasi politik nonformal karena melalui interaksi tersebut terbentuk kepercayaan, citra positif, dan hubungan emosional antara keluarga pejabat dengan masyarakat.

Dalam konteks komunikasi politik, adaptasi Krisseptiana menunjukkan bahwa peran istri pejabat dapat berkembang dari peran simbolik menjadi peran yang lebih aktif. Ia tidak hanya hadir dalam kegiatan resmi, tetapi juga menjalankan fungsi sosial yang berhubungan dengan kebutuhan

masyarakat. Dengan demikian, strategi adaptasi Krisseptiana memperlihatkan adanya perubahan dari identitas profesional menuju identitas publik yang lebih luas.

Pada pengalaman Listyati Purnama Rusdiana, strategi adaptasi dilakukan melalui kehati-hatian dalam menempatkan diri. Berbeda dengan Krisseptiana dan Inggit, Listyati memiliki batasan yang lebih kuat karena statusnya sebagai ASN. Ia harus menjalankan peran sebagai istri pejabat tanpa melanggar aturan netralitas dan etika birokrasi. Oleh karena itu, strategi adaptasi Listyati lebih banyak berbentuk negosiasi peran daripada penampilan politik yang terbuka.

Listyati menjalankan dukungan terhadap suami melalui cara yang lebih tidak langsung. Dukungan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *silent support*, yaitu dukungan yang tidak selalu tampak dalam kegiatan politik terbuka, tetapi hadir melalui doa, restu, pengelolaan keluarga, pemberian masukan, dan dukungan moral. Bentuk dukungan ini menunjukkan bahwa pengalaman politik tidak selalu tampil dalam bentuk aktivitas publik yang eksplisit. Dalam kasus Listyati, pengalaman politik justru terlihat dari cara ia menjaga keseimbangan antara posisi sebagai ASN dan posisi sebagai istri pejabat.

Negosiasi peran Listyati juga terlihat dari kesadarannya untuk tidak melewati batas institusional. Ia memahami bahwa kehadirannya dalam ruang publik harus disesuaikan dengan aturan yang melekat pada dirinya sebagai aparatur negara. Hal ini membuat perannya sebagai istri pejabat dijalankan secara lebih hati-hati, selektif, dan terukur. Ia tidak dapat sepenuhnya bergerak bebas dalam kegiatan yang berhubungan dengan politik, tetapi tetap dapat menjalankan peran sosial melalui organisasi dan kegiatan yang tidak bertentangan dengan statusnya sebagai ASN.

Strategi adaptasi Listyati memperlihatkan bahwa pengalaman politik istri pejabat tidak selalu identik dengan tampil di depan publik atau memimpin

kegiatan secara terbuka. Pengalaman politik juga dapat berlangsung dalam bentuk pengelolaan batas, pengendalian diri, dan pilihan untuk tetap berada dalam koridor institusional. Dalam hal ini, Listyati menunjukkan bentuk pengalaman politik yang lebih senyap, tetapi tetap penting karena memperlihatkan adanya proses negosiasi antara identitas pribadi, keluarga, birokrasi, dan politik.

Dengan demikian, pengalaman Listyati menegaskan bahwa istri pejabat tidak dapat dipahami sebagai kelompok yang memiliki ruang gerak sama. Posisi sosial dan institusional setiap informan membentuk cara mereka menjalankan peran. Bagi Listyati, strategi adaptasi bukan terletak pada perluasan peran secara terbuka, melainkan pada kemampuan menjaga batas antara dukungan keluarga dan kewajiban sebagai ASN.

Pada pengalaman Inggit Soraya, strategi adaptasi dilakukan melalui pembelajaran cepat terhadap dunia pemerintahan dan kegiatan publik. Sebagai seseorang yang memiliki latar belakang dunia usaha, Inggit harus menyesuaikan diri dengan struktur pemerintahan, organisasi perempuan, kegiatan protokoler, dan ekspektasi masyarakat. Perubahan ini menuntut dirinya untuk belajar memahami peran baru dalam waktu yang relatif singkat.

Adaptasi Inggit tidak hanya dilakukan secara teknis, tetapi juga melalui pemaknaan religius terhadap peran yang dijalani. Ia memaknai posisi sebagai istri pejabat sebagai amanah yang harus dijalankan sebaik mungkin. Pemaknaan tersebut membantu Inggit mengatasi rasa ragu, takut, atau tidak siap ketika menghadapi tuntutan baru. Dengan memaknai peran sebagai amanah, Inggit dapat mengubah tekanan menjadi tanggung jawab moral dan sosial.

Strategi adaptasi Inggit juga terlihat melalui keterlibatannya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan UMKM, ekonomi kreatif, dan kegiatan perempuan. Latar belakang sebagai wirausahawan membuat Inggit memiliki kepekaan terhadap persoalan

ekonomi masyarakat. Hal ini kemudian menjadi salah satu cara baginya untuk menjalankan peran publik sebagai istri pejabat. Ia tidak hanya hadir dalam kegiatan seremonial, tetapi juga membawa pengalaman dan pengetahuan dari dunia usaha ke dalam kegiatan sosial.

Dalam konteks komunikasi politik, adaptasi Inggit menunjukkan bahwa istri pejabat dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat melalui isu-isu yang dekat dengan kehidupan warga. Kegiatan pemberdayaan ekonomi, penguatan UMKM, dan pengembangan potensi lokal menjadi ruang komunikasi yang memungkinkan dirinya membangun hubungan dengan masyarakat. Melalui ruang tersebut, Inggit menjalankan komunikasi politik yang berbasis pada kedekatan sosial dan kebermanfaatan.

Pengalaman Inggit menunjukkan bahwa proses adaptasi istri pejabat tidak selalu berlangsung tanpa tekanan. Ada proses belajar, keraguan, dan penyesuaian yang harus dilalui. Namun, melalui pemaknaan amanah dan orientasi kebermanfaatan, Inggit mampu membangun cara sendiri dalam menjalankan peran publik. Dengan demikian, strategi adaptasi Inggit memperlihatkan perubahan dari identitas wirausahawan menuju identitas publik yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

4.1.5 *New Equilibrium* (Terbentuknya Identitas Baru sebagai Istri Pejabat)

Tahap *new equilibrium* merupakan tahap akhir dalam struktur naratif Todorov. Pada tahap ini, tokoh telah melewati gangguan, menyadari konflik, melakukan upaya adaptasi, dan akhirnya menemukan bentuk keseimbangan baru dalam kehidupannya (Todorov, 1977:113). Keseimbangan baru tidak berarti tokoh kembali pada keadaan semula, tetapi menunjukkan terbentuknya kondisi baru setelah proses perubahan dilalui. Dalam penelitian ini, *new equilibrium* terlihat ketika Krisseptiana, Listyati Purnama Rusdiana, dan

Inggit Soraya mampu memahami dan menjalankan peran sebagai istri pejabat dengan cara masing-masing.

Keseimbangan baru yang terbentuk dalam pengalaman politik istri pejabat tidak bersifat sama pada setiap informan. Krisseptiana menemukan keseimbangan melalui kemampuan mengelola citra, menjalankan kegiatan sosial, dan membangun kedekatan dengan masyarakat. Listyati menemukan keseimbangan melalui bentuk dukungan yang lebih senyap, hati-hati, dan sesuai dengan batasan institusional sebagai ASN. Inggit menemukan keseimbangan melalui pemaknaan peran sebagai amanah serta keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa identitas baru sebagai istri pejabat tidak terbentuk secara seragam, tetapi sesuai dengan latar belakang dan pengalaman masing-masing informan.

Tahap *new equilibrium* juga memperlihatkan bahwa pengalaman politik istri pejabat menghasilkan transformasi identitas. Ketiga informan tidak lagi hanya memahami diri berdasarkan identitas sebelum politik, seperti profesional, ASN, atau pengusaha. Mereka kemudian membangun identitas baru sebagai figur publik yang memiliki tanggung jawab sosial, komunikasi dengan masyarakat, dan keterikatan dengan citra pemerintahan daerah. Identitas baru tersebut tidak menghapus identitas lama, tetapi memadukannya dengan peran baru sebagai istri pejabat.

Tabel 4.5 Perbandingan Dimensi *Decoding*

Informan	Krisseptiana		Listyati Purnama Rusdiana		Inggit Soraya	
Kategori koding	Dominan- Hegemonik	Negosiasi	Penerimaan Hegemonik (Peneliti)	Negosiasi Tuntutan Peran (<i>Negotiated Code</i>)	Penerimaan Hegemonik (Peneliti)	Negosiasi Tuntutan Peran (<i>Negotiated Code</i>)
Bukti Tekstual (Data Transkrip)	"Ibu dan bapak selama memimpin Kota Semarang enggak ada yang negatif... positif terus saya lihatnya".	"Kecewa... pasti dong... tapi sudah jalanya... jangan berlarut- larut sedihnya".	"Itu eh udah hampir semua kejawab Ibu." "Saya lihat beritanya itu ya?"	"...kadang tuh yo nelongso ah bojoku dikelilingi... dikampanyeke lo lah aku kok ya rak melu."	"Jadi kayak pas, takdir yang sudah ditakdirkan nih". "Ibu jadi belajar dari pengalaman, jadi kayak terjun langsung".	"...di pertengahan kemarin... saya sempat agak mau... Nyerah... tidak bisa membagi waktu...".
Analisis Makna (Encoding/Decoding)	Pewawancara (Chika) menerima	Bu Tia menegosiasikan kegagalan	Decoding: Peneliti (Chika) berada pada	Decoding: Terjadi pembacaan	Decoding: Peneliti (Chika) melakukan	Decoding: Terjadi posisi negosiasi dalam

	narasi keberhasilan Bu Tia sepenuhnya tanpa keraguan atau oposisi.	politiknya dengan keyakinan spiritual bahwa hal tersebut adalah kehendak Allah.	posisi dominan-hegemonik, mengonfirmasi aktivitas publik Bu Lies melalui validasi media online tanpa mempertanyakan dilema moralnya sebagai ASN yang suaminya berpolitik.	negosiasi dalam diri Bu Lies. Secara emosional ia ingin hadir di panggung politik mendukung suami (<i>nelongso</i>), namun diredam oleh kepatuhan rasionalnya terhadap aturan ASN demi keselamatan kariernya.	pembacaan dominan-hegemonik, menyetujui seluruh romantisasi takdir politik Bu Inggit dan memvalidasi keaktifannya tanpa menggali lebih dalam konflik kepentingannya antara bisnis dan jabatan publik.	diri Bu Inggit. Jiwa wirausahanya menolak membiarkan bisnisnya mengecil, namun egonya dinegosiasikan setelah mendapat masukan suami demi menghidupi karyawan dan tuntutan kewajiban mendampingi Wali Kota.
--	---	--	--	--	--	---

Sumber: Data primer diolah (2026)

Pada pengalaman Krisseptiana, keseimbangan baru terbentuk ketika ia mampu menjalankan peran sebagai istri pejabat dengan menempatkan kegiatan sosial sebagai ruang pengabdian. Perubahan dari perempuan profesional menjadi figur publik tidak lagi dipahami sebagai gangguan, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab yang harus dijalankan. Ia belajar bahwa posisi sebagai istri pejabat memberikan ruang untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat dan membantu berbagai program sosial.

Identitas baru Krisseptiana terbentuk melalui keterlibatan dalam organisasi dan kegiatan publik. Ia tidak hanya dikenal sebagai istri kepala daerah, tetapi juga sebagai figur yang aktif dalam kegiatan sosial, kesehatan, pemberdayaan, dan organisasi perempuan. Dalam konteks ini, keseimbangan baru terlihat dari kemampuannya menempatkan diri sebagai figur publik yang dapat menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Pengalaman Krisseptiana menunjukkan bahwa peran istri pejabat dapat bergerak dari pendampingan menuju pengabdian sosial. Ia menemukan bentuk keseimbangan baru dengan menerima bahwa ruang publik menjadi bagian dari kehidupannya. Kehadiran di tengah masyarakat, kemampuan menjaga komunikasi, dan keterlibatan dalam program sosial menjadi bagian dari identitas politik yang terbentuk selama mendampingi suami dalam jabatan publik.

Namun, keseimbangan baru tersebut tetap mengandung konsekuensi. Sebagai figur publik, Krisseptiana harus terus menjaga citra dan mengelola ekspektasi masyarakat. Dengan demikian, identitas baru sebagai istri pejabat bukan hanya memberikan ruang partisipasi, tetapi juga membawa tuntutan untuk selalu menjaga diri di hadapan publik.

Pada pengalaman Listyati, keseimbangan baru terbentuk melalui kemampuan menempatkan diri di antara dua identitas, yaitu sebagai ASN dan sebagai istri pejabat. Ia tidak sepenuhnya meninggalkan identitas birokratisnya, tetapi menyesuaikan peran sebagai istri pejabat agar tetap sesuai dengan aturan

dan etika kelembagaan. Dengan demikian, keseimbangan baru Listyati terbentuk melalui kehati-hatian dan pengelolaan batas.

Identitas baru Listyati sebagai istri pejabat tidak muncul dalam bentuk politik yang terbuka. Ia lebih banyak menjalankan peran melalui dukungan moral, dukungan keluarga, dan keterlibatan sosial yang tidak bertentangan dengan status ASN. Bentuk ini menunjukkan bahwa pengalaman politik tidak selalu tampak dalam aktivitas publik yang besar, tetapi juga dapat hadir dalam cara seseorang memilih untuk membatasi diri demi menjaga integritas institusional.

Keseimbangan baru Listyati juga memperlihatkan bahwa dukungan terhadap suami tidak harus selalu dilakukan secara terbuka. Dalam posisinya, dukungan senyap menjadi pilihan yang paling memungkinkan. Ia tetap menjalankan peran sebagai istri, tetapi tidak melepaskan tanggung jawab sebagai aparatur negara. Dengan cara tersebut, Listyati membangun identitas sebagai istri pejabat yang patuh pada aturan, menjaga etika, dan berhati-hati dalam ruang publik.

Pengalaman Listyati menunjukkan bahwa istri pejabat dapat menjalankan peran politik melalui bentuk yang tidak selalu terlihat secara langsung. Peran tersebut berada dalam ruang negosiasi antara keluarga, birokrasi, dan publik. Oleh karena itu, keseimbangan baru dalam pengalaman Listyati bukan berupa perluasan peran yang bebas, melainkan kemampuan mempertahankan integritas diri di tengah tuntutan peran yang berbeda.

Pada pengalaman Inggit Soraya, keseimbangan baru terbentuk ketika ia mampu memadukan identitas sebagai wirausahawan dengan peran sebagai istri pejabat. Peran publik yang semula terasa asing kemudian dimaknai sebagai kesempatan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui proses adaptasi, Inggit membangun identitas baru sebagai figur publik yang dekat dengan isu pemberdayaan ekonomi, UMKM, dan kegiatan perempuan.

Keseimbangan baru Inggit tampak dari kemampuannya menggunakan pengalaman usaha sebagai modal dalam menjalankan kegiatan publik. Ia tidak meninggalkan identitas sebagai wirausahawan, tetapi membawa cara pandang tersebut ke dalam peran sebagai istri pejabat. Hal ini terlihat dari orientasinya pada kegiatan yang bersifat produktif, pemberdayaan, dan penguatan masyarakat. Dengan demikian, pengalaman politik Inggit menghasilkan identitas baru yang memadukan dunia usaha dan dunia sosial-politik.

Pemaknaan terhadap peran sebagai amanah juga menjadi bagian penting dari keseimbangan baru Inggit. Dengan melihat posisi sebagai amanah, Inggit mampu menerima tuntutan yang melekat pada dirinya sebagai istri pejabat. Pemaknaan ini membantunya menata ulang perasaan ragu atau takut menjadi komitmen untuk menjalankan peran sebaik mungkin. Dalam konteks naratif Todorov, hal ini menunjukkan bahwa gangguan yang semula menciptakan ketidakseimbangan akhirnya menghasilkan tatanan makna baru.

Pengalaman Inggit menunjukkan bahwa identitas baru sebagai istri pejabat dapat terbentuk melalui proses belajar dan keberanian untuk menyesuaikan diri. Ia tidak hanya menjadi pendamping suami, tetapi juga menggunakan ruang publik untuk mendukung program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, keseimbangan baru Inggit adalah keseimbangan antara kehidupan pribadi, pengalaman usaha, dan tanggung jawab publik.

4.2 Pembahasan Pengalaman Politik Istri Pejabat

4.2.1 Peran Politik Substantif dan Seremonial Istri Pejabat

Pengalaman politik istri pejabat tidak dapat dipahami hanya melalui kehadiran mereka dalam berbagai kegiatan publik. Kehadiran tersebut perlu dibedakan berdasarkan jenis peran yang dijalankan, yaitu apakah peran tersebut bersifat seremonial atau substantif. Perbedaan ini penting karena tidak semua aktivitas istri pejabat menunjukkan keterlibatan politik yang sama. Ada kegiatan

yang lebih menempatkan istri pejabat sebagai simbol pendamping kepala daerah, tetapi ada pula kegiatan yang menunjukkan keterlibatan aktif, mandiri, dan memiliki kontribusi nyata terhadap masyarakat.

Peran seremonial atau simbolik dapat dipahami sebagai peran yang dijalankan karena posisi istri pejabat melekat pada jabatan suami. Dalam peran ini, kehadiran istri pejabat lebih berfungsi sebagai representasi keluarga pejabat, pelengkap kegiatan protokoler, atau simbol dukungan terhadap kepala daerah. Peran seremonial biasanya tampak dalam kegiatan mendampingi suami, menghadiri acara resmi, mengikuti agenda pemerintahan, menerima tamu, menghadiri undangan organisasi, atau hadir dalam kegiatan yang secara protokoler membutuhkan kehadiran istri pejabat.

Sementara itu, peran substantif adalah peran yang menunjukkan keterlibatan aktif istri pejabat dalam kegiatan yang memiliki tujuan, dampak, dan kontribusi sosial tertentu. Peran ini dapat terlihat ketika istri pejabat memimpin organisasi, menjalankan program pemberdayaan, menjadi narasumber, menggerakkan komunitas, melakukan advokasi sosial, membangun jaringan masyarakat, atau terlibat dalam kegiatan yang tidak semata-mata mengikuti agenda suami. Dalam peran substantif, istri pejabat tidak hanya hadir sebagai simbol, tetapi juga menjalankan fungsi komunikasi, koordinasi, dan penggerakan sosial.

Pembedaan antara peran seremonial dan substantif membantu penelitian ini melihat pengalaman politik istri pejabat secara lebih kritis. Jika seluruh kegiatan istri pejabat langsung dipahami sebagai peran politik, maka analisis akan menjadi terlalu luas dan kurang tajam. Sebaliknya, jika seluruh kegiatan istri pejabat hanya dianggap sebagai pendampingan, maka penelitian akan mengabaikan bentuk-bentuk kontribusi nyata yang mereka lakukan di ruang publik. Oleh karena itu, penelitian ini memposisikan peran politik istri pejabat sebagai spektrum, yaitu bergerak dari peran simbolik hingga peran substantif.

Dalam pengalaman Krisseptiana, peran seremonial tampak ketika ia hadir dalam berbagai kegiatan resmi sebagai istri Wali Kota Semarang. Kehadiran tersebut melekat pada posisi suami sebagai kepala daerah sehingga Krisseptiana sering kali hadir sebagai representasi keluarga pejabat. Dalam konteks ini, perannya dapat dipahami sebagai peran simbolik karena kehadirannya memperkuat citra kepemimpinan suami dan menunjukkan dukungan keluarga terhadap agenda pemerintahan.

Namun, pengalaman Krisseptiana tidak berhenti pada peran seremonial. Ia juga menjalankan peran substantif melalui keterlibatan dalam organisasi dan kegiatan sosial. Keterlibatannya dalam PKK, Dekranasda, kegiatan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta program sosial menunjukkan bahwa dirinya memiliki ruang kerja yang tidak sepenuhnya bergantung pada agenda suami. Dalam kegiatan tersebut, Krisseptiana tidak hanya hadir, tetapi juga menjalankan fungsi komunikasi dengan masyarakat, membangun jaringan, dan menggerakkan program sosial.

Peran substantif Krisseptiana terlihat dari kemampuannya menggunakan posisi sebagai istri pejabat untuk memperluas akses terhadap kegiatan sosial. Ia berinteraksi langsung dengan masyarakat, mendengar kebutuhan warga, dan berperan dalam kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga, perempuan, anak, serta lingkungan. Dalam konteks komunikasi politik, aktivitas tersebut menunjukkan bahwa istri pejabat dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat melalui ruang sosial yang lebih dekat dengan kehidupan warga.

Dengan demikian, pengalaman Krisseptiana menunjukkan adanya pergeseran dari peran seremonial menuju peran substantif. Ia memang hadir sebagai istri kepala daerah, tetapi dalam praktiknya ia juga menjalankan fungsi sosial yang lebih aktif. Peran politiknya tidak selalu muncul dalam bentuk politik elektoral, melainkan dalam bentuk komunikasi sosial, pengabdian

masyarakat, dan penguatan citra pemerintahan melalui kedekatan dengan warga.

Pada pengalaman Listyati Purnama Rusdiana, pembedaan antara peran seremonial dan substantif menjadi lebih kompleks karena ia memiliki status sebagai ASN. Peran seremonial terlihat ketika Listyati hadir dalam kegiatan yang berkaitan dengan posisi suaminya sebagai Wakil Wali Kota Semarang. Dalam kegiatan tersebut, kehadirannya dapat dipahami sebagai bentuk dukungan simbolik terhadap suami sekaligus sebagai bagian dari representasi keluarga pejabat.

Namun, status Listyati sebagai ASN membuat ruang geraknya tidak sebebas istri pejabat yang tidak terikat aturan birokrasi. Ia harus menjaga netralitas dan berhati-hati dalam menampilkan dukungan politik. Oleh karena itu, peran substantif Listyati tidak selalu tampak dalam bentuk aktivitas politik terbuka. Peran substantifnya lebih terlihat dalam kemampuan menempatkan diri, menjaga etika kelembagaan, menjalankan dukungan moral, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang tidak bertentangan dengan posisinya sebagai aparatur negara.

Dalam konteks ini, peran substantif Listyati perlu dibaca secara berbeda. Substansi perannya tidak terutama terletak pada keberanian tampil di ruang politik, tetapi pada kemampuannya menjaga batas antara keluarga, birokrasi, dan publik. Dukungan yang diberikan kepada suami lebih banyak dilakukan dalam bentuk dukungan senyap, seperti memberikan restu, menjaga keluarga, menjadi tempat berdiskusi, dan mendukung dari belakang tanpa melanggar aturan institusional.

Dengan demikian, pengalaman Listyati menunjukkan bahwa peran politik substantif tidak selalu harus ditampilkan secara terbuka. Dalam kondisi tertentu, peran yang substantif justru muncul melalui pengelolaan batas dan kepatuhan terhadap etika kelembagaan. Posisi Listyati memperlihatkan bahwa

pengalaman politik istri pejabat dapat dibentuk oleh pembatasan institusional yang membuat bentuk partisipasinya berbeda dari informan lain.

Pada pengalaman Inggit Soraya, peran seremonial tampak ketika ia hadir dalam berbagai kegiatan resmi sebagai istri Wali Kota Pekalongan. Kehadiran tersebut merupakan bagian dari ekspektasi sosial terhadap istri kepala daerah. Dalam konteks ini, Inggit menjalankan fungsi simbolik sebagai pendamping suami dan representasi keluarga kepala daerah.

Namun, peran Inggit juga berkembang menjadi lebih substantif melalui keterlibatannya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, UMKM, dan organisasi perempuan. Latar belakangnya sebagai wirausahawan membuat Inggit memiliki perhatian terhadap kegiatan produktif masyarakat. Ia tidak hanya mengikuti kegiatan sebagai pendamping, tetapi juga membawa pengalaman dan pengetahuan dari dunia usaha ke dalam kegiatan publik.

Peran substantif Inggit terlihat ketika ia terlibat dalam kegiatan yang memiliki orientasi pemberdayaan. Dalam kegiatan tersebut, Inggit dapat membangun komunikasi dengan pelaku UMKM, perempuan, komunitas lokal, dan masyarakat yang membutuhkan penguatan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman politiknya tidak hanya berlangsung melalui jabatan suami, tetapi juga melalui kemampuannya menghubungkan pengalaman pribadi dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks komunikasi politik lokal, peran Inggit memperlihatkan bahwa istri pejabat dapat menjalankan fungsi sebagai penggerak sosial. Ia menggunakan ruang yang dimiliki sebagai istri kepala daerah untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan perempuan. Dengan demikian, peran politik Inggit tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga substantif karena berhubungan dengan aktivitas yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.

Berdasarkan pengalaman ketiga informan, dapat disimpulkan bahwa peran istri pejabat berada dalam spektrum antara seremonial dan substantif.

Peran seremonial muncul karena posisi mereka melekat pada jabatan suami. Dalam peran ini, kehadiran istri pejabat berfungsi sebagai simbol pendamping, representasi keluarga pejabat, dan bagian dari protokol sosial-politik. Peran ini tidak dapat diabaikan karena dalam politik lokal, simbol kehadiran juga memiliki makna penting dalam membangun citra dan legitimasi sosial.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa istri pejabat dapat menjalankan peran substantif. Peran substantif muncul ketika mereka tidak hanya hadir, tetapi juga memimpin, menggerakkan, menghubungkan, dan menjalankan kegiatan yang memiliki dampak sosial. Krisseptiana menunjukkan peran substantif melalui kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat. Listyati menunjukkan peran substantif melalui pengelolaan batas institusional dan dukungan senyap yang menjaga integritas birokrasi. Inggit menunjukkan peran substantif melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kegiatan perempuan.

Dengan demikian, pengalaman politik istri pejabat tidak dapat direduksi menjadi pendampingan semata. Namun, pengalaman tersebut juga tidak dapat langsung disamakan dengan peran politik formal kepala daerah. Peran politik istri pejabat bersifat nonformal, sosial, dan komunikatif. Mereka menjalankan fungsi politik melalui ruang-ruang yang dekat dengan masyarakat, seperti organisasi perempuan, kegiatan sosial, pemberdayaan ekonomi, komunitas, dan komunikasi interpersonal.

Pembedaan ini membantu memperjelas posisi istri pejabat sebagai aktor komunikasi politik nonformal. Mereka bukan pejabat yang dipilih melalui pemilu, tetapi memiliki ruang pengaruh tertentu karena kedekatannya dengan kekuasaan dan masyarakat. Oleh karena itu, peran mereka perlu dibaca secara proporsional, yaitu sebagai peran yang dapat bersifat simbolik sekaligus substantif tergantung pada bentuk keterlibatan, tingkat kemandirian, dan dampak kegiatan yang dilakukan.

4.2.2 Pengalaman Politik sebagai Proses Pembelajaran dan Adaptasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak satu pun informan memiliki latar belakang sebagai politisi sebelum suami mereka menduduki jabatan publik. Krisseptiana berasal dari dunia perbankan, Listyati berasal dari lingkungan birokrasi pemerintahan, sedangkan Inggit berasal dari dunia kewirausahaan. Perbedaan latar belakang tersebut menghasilkan cara pandang yang berbeda terhadap politik dan kekuasaan. Namun demikian, ketiganya mengalami proses yang sama, yaitu harus mempelajari dunia politik melalui pengalaman langsung setelah memasuki lingkungan pemerintahan.

Fenomena ini sejalan dengan teori *Political Socialization* yang menjelaskan bahwa individu mempelajari nilai, norma, orientasi, dan perilaku politik melalui interaksi sosial yang berlangsung sepanjang hidupnya (Almond & Verba, 1989). Politik dalam penelitian ini tidak dipelajari melalui pendidikan formal, melainkan melalui pengalaman praktis, keterlibatan dalam organisasi, interaksi dengan masyarakat, serta partisipasi dalam berbagai kegiatan publik. Krisseptiana belajar memahami politik melalui kegiatan PKK dan interaksi dengan masyarakat. Listyati mempelajari dinamika politik melalui pengalamannya sebagai ASN dan istri wakil wali kota. Sementara itu, Inggit harus belajar memahami politik dari posisi seorang pengusaha yang sebelumnya tidak memiliki pengalaman politik yang signifikan.

Temuan ini menunjukkan bahwa pengalaman politik perempuan sering kali bersifat tidak langsung (*indirect political experience*). Mereka tidak memasuki dunia politik melalui jalur partai atau pemilu, tetapi melalui perubahan posisi sosial yang terjadi akibat karier politik pasangan mereka. Meskipun demikian, proses tersebut tetap menghasilkan pembelajaran politik yang signifikan dan membentuk cara mereka memahami kekuasaan, kepemimpinan, dan pelayanan publik.

4.2.3 Politik sebagai Ruang Negosiasi Identitas

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa pengalaman politik istri pejabat selalu diwarnai oleh proses negosiasi identitas. Ketiga informan mengalami perubahan identitas yang cukup besar ketika harus beralih dari identitas profesional yang telah mereka miliki sebelumnya menjadi figur publik yang berada dalam sorotan masyarakat.

Pada Krisseptiana, negosiasi identitas terlihat dari upayanya membangun citra sebagai figur yang selalu kuat, sehat, dan bahagia. Pernyataannya bahwa “sakit tidak boleh tampak sakit dan sedih tidak boleh tampak sedih” menunjukkan adanya tuntutan untuk mengelola emosi dan citra diri secara terus-menerus. Dalam perspektif dramaturgi Erving Goffman (1959), kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk *impression management*, yaitu upaya individu mengelola penampilan diri agar sesuai dengan harapan sosial yang melekat pada perannya. Sebagai istri kepala daerah, Krisseptiana tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga merepresentasikan kepemimpinan suaminya di hadapan masyarakat.

Pada Listyati, negosiasi identitas berlangsung antara perannya sebagai ASN dan sebagai istri politisi. Sebagai ASN, ia diwajibkan menjaga netralitas politik. Sebagai istri wakil wali kota, ia memiliki dorongan emosional untuk terlibat dan mendukung perjuangan politik suaminya. Konflik tersebut terlihat dari ungkapannya yang merasa “nelongso” ketika melihat suaminya dikelilingi tim kampanye sementara dirinya tidak dapat ikut terlibat. Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori peran (*Role Theory*) yang dikemukakan oleh Biddle (1986). Menurut teori tersebut, konflik peran terjadi ketika individu harus menjalankan dua atau lebih peran yang memiliki tuntutan berbeda bahkan bertentangan. Dalam kasus Listyati, konflik muncul antara loyalitas emosional sebagai pasangan hidup dan kewajiban profesional sebagai ASN.

Pada Inggit, negosiasi identitas terjadi antara perannya sebagai pengusaha dan sebagai istri wali kota. Sebelum memasuki ruang politik,

identitas utama yang dimilikinya adalah sebagai pelaku usaha. Ketika suaminya menjabat sebagai wali kota, ia harus mengalokasikan waktu dan energinya untuk berbagai aktivitas publik. Kondisi tersebut bahkan menimbulkan keinginan untuk menyerah karena sulit membagi waktu antara kepentingan usaha dan kewajiban sosial-politik. Temuan ini menunjukkan bahwa pengalaman politik perempuan tidak hanya menghasilkan akses terhadap ruang publik, tetapi juga menuntut pengorbanan identitas dan kepentingan pribadi.

4.2.4 Komunikasi Politik melalui Ruang Sosial dan Budaya

Penelitian ini menemukan bahwa komunikasi politik yang dilakukan para informan lebih banyak berlangsung melalui ruang-ruang sosial dan budaya dibandingkan melalui institusi politik formal. PKK, Posyandu, kelompok senam, organisasi perempuan, pengajian, komunitas sosial, dan media sosial menjadi sarana utama komunikasi mereka dengan masyarakat.

Temuan ini mendukung pandangan Denton dan Woodward (1998) yang menyatakan bahwa komunikasi politik tidak terbatas pada aktivitas kampanye, pidato politik, atau komunikasi pemerintahan formal. Komunikasi politik juga berlangsung melalui interaksi sosial yang membentuk persepsi masyarakat terhadap pemimpin dan pemerintahan. Dalam konteks penelitian ini, para informan menjalankan fungsi komunikasi politik melalui pendekatan yang bersifat interpersonal, partisipatif, dan berbasis relasi sosial.

Krisseptiana memanfaatkan jaringan PKK dan komunitas perempuan sebagai ruang komunikasi. Listyati menggunakan jaringan organisasi kemasyarakatan sebagai saluran komunikasi sosial. Sementara itu, Inggit memanfaatkan komunitas UMKM, pengajian, dan media sosial sebagai sarana membangun hubungan dengan masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan cenderung menggunakan model komunikasi yang berbasis hubungan (*relational communication*) dibandingkan model komunikasi yang bersifat kompetitif atau konfrontatif.

Dalam perspektif teori modal sosial (*Social Capital Theory*) Putnam (2000), jaringan sosial yang dimiliki para informan merupakan sumber daya penting yang memungkinkan terjadinya kerja sama, pertukaran informasi, dan pembangunan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, aktivitas yang mereka lakukan tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan sosial, tetapi juga menjadi sarana membangun legitimasi sosial terhadap pemerintahan daerah.

4.2.5 Agensi Politik Perempuan dan Reproduksi Kekuasaan Patriarki

Pengalaman politik istri pejabat dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa perempuan dapat memiliki ruang peran dalam kehidupan politik lokal meskipun tidak selalu berada dalam jabatan politik formal. Krisseptiana, Listyati Purnama Rusdiana, dan Inggit Soraya menunjukkan bahwa posisi sebagai istri pejabat dapat membuka ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam kegiatan sosial, organisasi perempuan, komunikasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi, serta kegiatan publik lain yang berhubungan dengan pemerintahan daerah. Dalam pengertian ini, pengalaman politik istri pejabat dapat dibaca sebagai bentuk keterlibatan perempuan dalam ruang publik.

Namun demikian, penelitian ini perlu memberi batas yang jelas agar tidak menarik kesimpulan secara berlebihan. Keterlibatan istri pejabat dalam ruang publik tidak otomatis dapat disebut sebagai agensi politik perempuan dalam pengertian kritis. Agensi politik perempuan biasanya merujuk pada kemampuan perempuan untuk mengambil keputusan, menentukan sikap politik, memperjuangkan kepentingan tertentu, serta memengaruhi struktur sosial-politik berdasarkan kehendak dan kesadaran politiknya sendiri. Sementara itu, dalam penelitian ini, ruang keterlibatan ketiga informan masih banyak terbentuk karena posisi suami sebagai pejabat. Dengan demikian, peran publik yang mereka jalankan tetap tidak dapat dilepaskan dari struktur kekuasaan keluarga dan jabatan suami.

Di satu sisi, pengalaman ketiga informan menunjukkan adanya unsur agensi. Mereka tidak sepenuhnya pasif dalam menjalankan peran sebagai istri

pejabat. Krisseptiana menunjukkan agensi melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat. Listyati menunjukkan agensi melalui pilihan untuk menjaga batas institusional sebagai ASN sekaligus tetap memberi dukungan kepada suami dalam bentuk yang tidak terbuka. Inggit menunjukkan agensi melalui keterlibatan dalam pemberdayaan ekonomi dan pemaknaan peran sebagai amanah. Ketiganya menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan diri, mengambil keputusan, dan membentuk cara masing-masing dalam menjalankan peran publik.

Namun, di sisi lain, agensi tersebut tetap berada dalam struktur yang membatasi. Peran istri pejabat muncul karena relasi perkawinan dengan pejabat laki-laki. Jabatan dalam organisasi seperti PKK, Dekranasda, atau peran sosial lain sering kali melekat secara otomatis pada posisi suami. Hal ini menunjukkan bahwa ruang publik yang diperoleh istri pejabat tidak sepenuhnya lahir dari proses politik mandiri, melainkan dari struktur politik yang masih menempatkan perempuan dalam posisi relasional terhadap laki-laki. Dengan demikian, pengalaman politik istri pejabat juga dapat dibaca sebagai bagian dari reproduksi struktur patriarki, karena posisi perempuan di ruang publik tetap dikaitkan dengan statusnya sebagai istri.

Ketegangan antara agensi dan struktur inilah yang menjadi bagian penting dalam membaca pengalaman politik istri pejabat. Mereka memiliki ruang untuk bertindak, tetapi ruang tersebut tidak sepenuhnya bebas. Mereka dapat menjalankan kegiatan sosial dan membangun komunikasi dengan masyarakat, tetapi legitimasi awalnya tetap berasal dari posisi suami. Mereka dapat menjadi figur publik, tetapi identitas publik tersebut tetap melekat pada status sebagai istri pejabat. Oleh karena itu, pengalaman politik istri pejabat berada dalam posisi ambivalen, yaitu mengandung peluang partisipasi perempuan sekaligus menunjukkan masih kuatnya struktur sosial-politik yang menghubungkan perempuan dengan kekuasaan laki-laki.

Meskipun demikian, penelitian ini tidak diarahkan untuk membongkar secara mendalam apakah pengalaman politik istri pejabat merupakan bentuk agensi politik perempuan atau reproduksi kekuasaan patriarki. Hal tersebut menjadi batas penelitian karena pendekatan yang digunakan adalah pendekatan naratif, bukan pendekatan feminis kritis atau ekonomi-politik. Pendekatan naratif dalam penelitian ini lebih berfokus pada cerita pengalaman, perubahan peran, proses adaptasi, dan pemaknaan subjektif informan. Oleh karena itu, analisis mengenai agensi politik perempuan dan reproduksi patriarki hanya dibahas sebagai konteks reflektif, bukan sebagai fokus utama penelitian.

Dengan batas tersebut, temuan penelitian ini sebaiknya dipahami sebagai kajian mengenai pengalaman politik istri pejabat dalam menjalankan peran publik yang terbentuk melalui relasi keluarga, struktur pemerintahan, organisasi sosial, dan komunikasi masyarakat. Penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa istri pejabat sepenuhnya merupakan aktor politik mandiri, tetapi juga tidak menempatkan mereka semata-mata sebagai pelengkap simbolik suami. Temuan penelitian menunjukkan bahwa istri pejabat berada dalam ruang antara: mereka memiliki peluang untuk berpartisipasi dan membangun pengaruh sosial, tetapi peluang tersebut tetap dibatasi oleh struktur jabatan suami, norma gender, aturan institusional, dan ekspektasi masyarakat.

Oleh karena itu, pengalaman politik istri pejabat dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi publik yang bersifat relasional. Disebut relasional karena peran tersebut terbentuk melalui hubungan dengan suami sebagai pejabat, hubungan dengan organisasi sosial, hubungan dengan masyarakat, dan hubungan dengan struktur pemerintahan daerah. Dalam ruang relasional tersebut, istri pejabat dapat menjalankan fungsi komunikasi politik nonformal, tetapi tetap berada dalam batas-batas sosial dan institusional tertentu.

Pembacaan ini penting agar penelitian tidak jatuh pada dua kesimpulan ekstrem. Kesimpulan pertama adalah menganggap istri pejabat sepenuhnya sebagai aktor politik mandiri yang memiliki posisi setara dengan kepala daerah.

Kesimpulan ini kurang tepat karena secara formal mereka tidak memperoleh mandat elektoral langsung dari masyarakat. Kesimpulan kedua adalah menganggap istri pejabat hanya sebagai pendamping pasif yang tidak memiliki kontribusi. Kesimpulan ini juga kurang tepat karena data penelitian menunjukkan adanya keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial, organisasi, pemberdayaan, dan komunikasi masyarakat.

Dengan demikian, posisi yang lebih proporsional adalah melihat istri pejabat sebagai aktor komunikasi politik nonformal yang perannya berada di antara simbol pendampingan dan kontribusi substantif. Mereka tidak memiliki otoritas politik formal seperti kepala daerah, tetapi dapat memiliki pengaruh sosial melalui kegiatan yang dijalankan. Mereka tidak sepenuhnya bebas dari struktur patriarki, tetapi juga tidak sepenuhnya pasif di dalam struktur tersebut. Pada titik inilah pengalaman politik istri pejabat menunjukkan kompleksitasnya sebagai pengalaman perempuan dalam ruang politik lokal.